

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Pendidikan Kewarganegaraan atau disingkat PKn merupakan salah satu mata pelajaran yang penting dalam suatu jenjang pendidikan, baik dijenjang sekolah dasar (SD), SMP, SMA dan perguruan tinggi, karena dalam mata pelajaran PKn perkembangan moral dan budi pekerti siswa sebagai warga negara yang baik sangat ditekankan dan dibentuk.

Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia mulai secara formal sebelumnya dikenal dengan nama "*Civics*" dalam kurikulum SMA tahun 1962. mata pelajaran ini berisikan materi tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Dept. P & K: 1962). Pada saat itu, kewarganegaraan pada dasarnya berisikan pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin sejarah, geografi, ekonomi dan politik, pidato-pidato presiden, deklarasi hak asasi manusia, dan pengetahuan tentang perserikatan bangsa-bangsa.

Selanjutnya dalam kurikulum 1975 istilah tersebut diganti dengan Pendidikan Moral Pancasila (PMP), yang berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. Perubahan ini sejalan dengan misi pendidikan yang diamanatkan oleh Tap. MPR II/MPR/1973. Mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib untuk SD, SMP, SMA, SPG dan sekolah kejuruan. Mata pelajaran PMP ini terus dipertahankan baik istilah maupun isinya sampai berlakunya kurikulum 1984 yang pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975.

Berlakunya Undang-undang No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggariskan adanya pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bahan kajian wajib kurikulum semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan (pasal 39), kurikulum pendidikan dasar dan menengah 1994 mengakomodasikan misi baru pendidikan tersebut dengan memperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKn. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum PPKn 1994 mengorganisasikan materi pembelajarannya bukan atas dasar rumusan butir-butir nilai P4, tetapi atas dasar konsep nilai yang disaripatkan dari P4 dan sumber resmi lainnya yang ditata dengan menggunakan spiral meluas atau *"spiral of conceptdevelopment"*. Pendekatan ini mengartikulasikan sila-sila Pancasila dengan jabaran nilainya untuk setiap jenjang pendidikan dan serta dalam setiap kelas.

Sementara itu untuk mengimbangi dinamika perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) yang demikian cepat

sejak tahun 2004 dilakukan pembaharuan kurikulum. Pada saat kurikulum 2004 disosialisasikan di sekolah-sekolah, yang dikenal dengan sebutan kegiatan *filoting*, Peraturan Pemerintah (PP) tentang standar nasional pendidikan (PP SNP) diterbitkan. PP tersebut mengamanatkan bahwa yang berwenang menyusun kurikulum adalah satuan pendidikan yang disebut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Sementara dalam kurikulum 2004, kurikulum masih disusun oleh pemerintah. Jika hal ini dibiarkan berarti melanggar aturan. Maka dilakukanlah perubahan berkelanjutan (*kontinu*) yang dilakukan badan standar nasional pendidikan (BSNP).

Berdasarkan bahan dasar yang ada di kurikulum 2004 BSNP mengembangkan standar isi (Permen Nomor 22 Tahun 2006) dan standar kompetensi lulusan (Permen Nomor 23 Tahun 2006). Standar isi dan standar kompetensi lulusan itu merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam menyusun KTSP. Dalam standar isi maupun standar kompetensi lulusan, PPKn diubah lagi namanya menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa pendidikan dilakukan agar mendapatkan tujuan yang diharapkan bersama yaitu :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 UU RI No 20/2003)

Memperhatikan isi dari UU tersebut di atas tentang sistem pendidikan nasional, bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh keberhasilan pendidikan dari bangsa itu sendiri. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan maka setiap pelaku pendidikan harus memahami tujuan pendidikan nasional, yaitu membangun kualitas manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dapat meningkatkan hubungan dengan-Nya, sebagai warga Negara yang ber Pancasila mempunyai semangat dan kesadaran yang tinggi, berbudi pekerti yang luhur dan berkepribadian yang kuat, cerdas, terampil, dapat mengembangkan dan menyuburkan sikap demokrasi, dapat memelihara hubungan yang baik antara sesama manusia dengan lingkungan, serta sehat jasmani dan rohani.

2.1.1.1 Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Pada hakikatnya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk menyiapkan para siswa kelak sebagai warga masyarakat sekaligus warga negara yang baik. Sehubungan dengan tujuan pendidikan nasional tersebut, maka pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam jenjang pendidikan dasar dan negara secara konseptual mengandung komitmen utama dalam pencapaian dimensi tujuan pengembangan kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Berdasarkan orientasi pada komitmen tersebut, maka peran dan fungsi serta tanggung jawab guru Pendidikan Kewarganegaraan pada setiap jenjang pendidikan diharapkan untuk mampu menjadikan para siswa sebagai para

calon warga negara yang baik. adapun ciri-cirinya antara lain religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, toleran, sadar akan hak dan kewajiban, mencintai kebenaran dan keadilan, peka terhadap lingkungan, mandiri dan percaya diri, sederhana, terbuka penuh pengertian terhadap kritik dan saran, patuh dan taat terhadap peraturan, serta kreatif dan inovatif.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah salah satu wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berfikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

Winataputra (2001: 131) memperhatikan perkembangan pemikiran tentang *civic* dan *civic education*, atas dasar kajiannya secara teoritik, Winataputra merumuskan pengertian "*civics, citizenship/civic education*" sebagai berikut:

- a. *"Civics is the study of government taught in the schools. It is an area of learning dealing with how democratic government has been and should be carried out, and how the citizen should carry out his duties and rights purposefully with full responsibility."*
- b. *"Civic/Citizenship education can be defined in two ways:*
 1. *In the first sense, Civic Education is an area of learning, primarily intended to develop knowledge attitudes, and skills so the students become "good citizens, with learning experiences carefully selected and organized around the basic concepts of political science,*
 2. *In another sense, Civic Education is a by-product of variety of areas of learning undertaken in and out-of formal school settings as well as a by-product of a complex network of human interactions in daily activities concerned with the development of civic responsibility."*

Disimpulkan berdasarkan pendapat Winataputra di atas, bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang berisikan tentang pemerintahan

yang diajarkan di sekolah, dimana dalam keadaan pemerintahan yang demokratis tersebut, warga negara hendaknya melaksanakan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.

Definisi pendidikan kewarganegaraan berikutnya menurut Winataputra, bahwa pendidikan kewarganegaraan juga berisikan tentang bagaimana mengembangkan sikap, keterampilan siswa untuk menjadi warga negara yang baik, dimana siswa bisa mendapatkannya melalui pengalaman belajar dan memiliki konsep-konsep dasar ilmu politik. Juga dalam pendidikan kewarganegaraan, siswa dapat berinteraksi melalui kehidupan sehari-hari untuk berkembang menjadi warga negara yang bertanggung jawab.

Berdasarkan Modul Kapita Selekt PKn (Standar Isi BSNP 2006: 7) pengertian PKn adalah :

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku sehari-hari, baik sebagai individu, anggota masyarakat maupun makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang membekali siswa dengan budi pekerti, pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan warga negara dengan negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa PKn merupakan suatu mata pelajaran yang membekali siswa dengan budi pekerti, pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan warga negara dengan negara, serta pendidikan pendahuluan bela Negara yang bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia agar menjadi warga negara yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri dan dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Menurut M Daryono (1997: 1) Pendidikan Kewarganegaraan adalah “nama dari suatu mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum sekolah”.

SK Mendikbud (No.060/U/1993:69), ”pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan sebagai usaha untuk membekali siswa dengan budi pekerti, pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara sesama warga negara maupun antar warga negara serta pendidikan pendahuluan bela negara”.

Menurut kurikulum 2004 Paradigma Baru pasca KBK (2003: 2) “Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu mata pelajaran yang terdapat dalam sekolah yang berusaha membina perkembangan moral anak didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agar dapat mencapai perkembangan secara optimal dan dapat diwujudkan dalam kehidupannya sehari-hari.

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, merupakan produk Lembaga Tertinggi Negara Tahun 1973. Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan konsekuensi dari pengakuan atas kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila, secara yuridis formal telah diterima sebagai dasar

negara. Konsekuensi dari pernyataan tersebut ialah bahwa dalam penyelenggaraan negara segala gerak langkahnya harus sejalan dan didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Ki Hadjar Dewantara (1950: 1 dan 4) mengatakan bahwa “di dalam Pancasila dapat dikemukakan sifat-sifat pokok dari kehalusan dan keluhuran budi manusia”.

Jalur sekolah adalah salah satu wahana strategis untuk mengembangkan dan mencapai tujuan pendidikan melalui proses pendidikan yang menyatukan pengembangan ranah pengetahuan, keterampilan, serta sikap, dan nilai untuk mengembangkan kepribadian dan perwujudan dari anak didik. Hal ini disebabkan karena sekolah, memiliki program terarah dan terencana, serta memiliki komponen-komponen pendidikan yang saling berinteraksi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan. Demikian juga saling berperannya berbagai mata pelajaran yang secara integratif membina tercapainya sifat-sifat yang diharapkan dimiliki oleh seorang warga negara Indonesia yang terdidik.

Sebagai mata pelajaran, PKn membawa misi khusus dalam pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Tujuan pendidikan yang pencapaiannya dibebankan kepada mata pelajaran, dalam hal ini mata pelajaran PKn, adalah membimbing generasi muda untuk memahami dan menghayati Pancasila secara keseluruhan dan setiap sila darinya (*Kerangka Program PKn*).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah suatu usaha sadar, yang terencana dan terarah, melalui pendidikan formal, untuk mentransformasikan dan

mengembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada anak didik. Pengembangan nilai dimaksudkan anak didik dapat mencerna melalui akal, dan menumbuhkan rasionalitas sesuai dengan kemampuannya mengembangkan rasionalitas tentang nilai Pancasila, sehingga anak akan mencapai perkembangan penalaran moral seoptimal mungkin.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berusaha membentuk manusia Indonesia seutuhnya sebagai perwujudan kepribadian Pancasila, yang mampu melaksanakan pembangunan masyarakat Pancasila. Maka Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menduduki tempat yang sangat sentral dan strategis dalam konstelasi pendidikan nasional.

2.1.1.2 Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Menurut M. Daryono dkk (1997: 29)“ Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berusaha membentuk manusia seutuhnya sebagai perwujudan kepribadian bangsa, yang melaksanakan pembangunan masyarakat Pancasila, tanpa PKn, segala kepintaran atau akal, ketinggian ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan dan kecekatan, tidak memberikan jaminan pada terwujudnya masyarakat Pancasila”.

Sriyono (1992: 123), menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan lebih ditekankan pada aspek moral dengan tujuan mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa PKn mempunyai kedudukan yang sangat penting, khususnya dalam pembentukan kepribadian manusia Indonesia yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tidak bisa lepas dari pendidikan nasional, dalam arti merupakan satu kesatuan dalam sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan pendidikan nasional.

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, dalam kehidupan yang demokratis. Dalam demokrasi konstitusional, *civic education* yang efektif adalah suatu keharusan karena kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat demokratis, berpikir kritis, dan bertindak secara sadar dalam dunia plural, memerlukan empati yang memungkinkan kita mendengar dan mengakomodasi pihak lain. Partisipasi warganegara dalam masyarakat demokratis, tentunya didasarkan pada pengetahuan, refleksi kritis dan pemahaman serta penerimaan akan hak dan kewajiban serta tanggung jawab warganegara.

Menurut kurikulum 2004 Paradigma Baru PKn berdasarkan standar isi BSNP (Departemen Pendidikan Nasional, 2003: 2) Tujuan Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut :

- 1) Berpikir secara kritis rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- 2) Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- 3) Berkembang secara positif dan demokratis berkembang diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dan dengan bangsa-bangsa lainnya.
- 4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam modul Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan (Standar Isi 2006:

7) secara eksplisit tercantum tujuan kurikuler PKn adalah kelima Pancasila, yaitu sebagai berikut :

- 1) Siswa memahami, menghayati, dan mengamalkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Siswa memahami, menghayati, dan mengamalkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3) Siswa memahami, menghayati, dan mengamalkan sila persatuan Indonesia.
- 4) Siswa memahami, menghayati, dan mengamalkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- 5) Siswa memahami, menghayati, dan mengamalkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari rumusan tujuan kurikuler tersebut, yang sangat jelas menggunakan istilah: memahami, menghayati, dan mengamalkan, maka berarti bahwa tujuan PKn itu meliputi:

- a. Aspek kognitif (pengetahuan, memahami), kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau berfikir/nalar.
- b. Aspek afektif (nilai, menghayati), kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional, seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral dan sebagainya.
- c. Aspek psikomotor (perilaku, mengamalkan), kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi system syaraf dan otot (*neuronmuscular system*) dan fungsi psikis. Kawasan ini terdiri

dari: (a) kesiapan (*set*); (b) peniruan (*imitation*); (c) membiasakan (*habitual*); (d) menyesuaikan (*adaptation*) dan (e) menciptakan (*origination*).

Menurut Ace Suryadi, (2009: 15) bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah terwujudnya partisipasi penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik warganegara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan ialah mendidik peserta didik untuk dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara republik Indonesia, terdidik dan bertanggung jawab.

Dan pendidikan kewarganegaraan yang dimanifestasikan di dalam kurikulum sekolah ialah sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

2.1.1.3 Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Pada bagian yang lain dalam Paradigma Baru PKn (Tim Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah 2006: 11) disebutkan juga fungsi Pendidikan Kewarganegaraan.

Fungsi dari Pendidikan Kewarganegaraan ialah :

1. Mengembangkan dan melestarikan nilai luhur Pancasila secara dinamis dan terbuka dalam arti bahwa nilai moral yang dikembangkan mampu menjawab tantangan perkembangan dalam masyarakat, tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia, yang merdeka, bersatu, dan berdaulat
2. Mengembangkan dan membina manusia Indonesia seutuhnya yang sadar politik dan konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-undang 1945.
3. Membina pengalaman dan kesadaran terhadap hubungan antara warga negara dengan negara, antara warga negara dengan sesama warga Negara dan pendidikan pendahuluan bela negara agar mengetahui dan mampu melaksanakan dengan baik hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dikatakan bahwa mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan suatu wahana yang berfungsi melestarikan nilai luhur Pancasila, mengembangkan dan membina manusia Indonesia seutuhnya serta membina pengalaman dan kesadaran warga negara untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang dapat bertanggung jawab dan dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Seperti halnya mata pelajaran lain, mata pelajaran PKn di sekolah memiliki rambu-rambu dalam proses pembelajarannya. Rambu-rambu ini berfungsi untuk menjadi acuan guru mata pelajaran PKn dalam melaksanakan proses pembelajaran yang dapat menciptakan suatu pembelajaran yang aktif, efektif dan efisien.

Berdasarkan modul Kapita Selekt PKn (Standar Isi BSNP 2006: 14) disebutkan bahwa :

Rambu-rambu pembelajaran PKn yaitu :

- 1) Membina tatanan nilai moral Pancasila secara utuh, bulat dan berkesinambungan sebagai dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup bangsa dan perjanjian luhur bangsa Indonesia.
- 2) Wujud pembinaan dalam garis-garis besar proses pembelajaran PKn melalui pembinaan konsep nilai moral Pancasila.
- 3) Membudayakan Pancasila secara dini, terprogram dan terus menerus.
- 4) Garis-garis besar proses pembelajaran PKn adalah salah satu perangkat kurikulum dan pedoman bagi guru.
- 5) Garis-garis besar proses pembelajaran PKn merupakan program minimal yang diorganisasikan ke dalam sistem semester, jatah waktunya 16 kali pertemuan.
- 6) Nilai-nilai yang dikembangkan dalam garis-garis besar proses pembelajaran PKn adalah nilai-nilai dasar Pancasila yang dijabarkan ke dalam nilai instrumental.
- 7) Rumusan tujuan PKn setiap kelas mengandung nilai moral Pancasila yang harus dikembangkan pada tingkat atau kelas dalam bentuk tujuan instruksional khusus.
- 8) Prinsip penyajian nilai dimulai dari mudah ke sukar, sederhana ke rumit, konkrit ke abstrak, lingkungan kehidupan siswa.
- 9) Penentuan kegiatan belajar mengajar didasarkan pada kebermanfaatan, kedekatan, dan harapan masyarakat, bangsa dan negara.
- 10) Uraian setiap pokok bahasan mencakup dua proses, yaitu pengenalan nilai, dan pembahasan atau pengamalannya.
- 11) Melakukan hubungan, bebas memilih strategi, metode dan media serta evaluasi, yang melibatkan orang tua dan masyarakat.

Berdasarkan pernyataan yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, mata pelajaran PKn merupakan suatu mata pelajaran yang mementingkan perubahan pada tingkah laku siswa, sehingga dalam proses pelaksanaan pembelajarannya harus terfokus pada siswa. Dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut seorang guru harus dapat mengembangkan segala kemampuan yang ia miliki, dengan tetap berpatokan pada rambu-rambu pembelajaran yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan demi tercapainya tujuan pembelajaran.

2.1.1.4 Visi dan Misi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan pasca KBK memiliki karakteristik pendidikan pengajarannya, sehingga ia mengemban misi (Standar isi BSNP) :

1. Mengembangkan kerangka berpikir baru yang dapat dijadikan landasan yang rasional untuk menyusun PKn baru, sebagai pendidikan intelektual kearah pembentukan warga negara yang demokratis. Misi tersebut dilakukan melalui penetapan kemampuan dasar PKn, sebagai landasan penyusunan standar kemampuan serta standar minimum yang ditetapkan secara rasional.
2. Menyusun substansi PKn baru sebagai pendidikan demokrasi yang berlandaskan pada latar belakang sosial budaya serta dalam konteks politik, kenegaraan, dan landasan konstitusi yang dituangkan dalam sila-sila demokrasi Indonesia. Misi tersebut dilakukan melalui penyusunan uraian materi pada masing-masing standar materi PKn yang dapat memfasilitasi berkembangnya pendidikan demokrasi.

Sedangkan visi PKn menurut standar isi BSNP ialah (Tim Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2006) :

“Mewujudkan proses pendidikan yang integral di sekolah untuk pengembangan kemampuan dan kepribadian warga negara yang cerdas, partisipasif dan bertanggung jawab yang pada gilirannya akan menjadi landasan untuk berkembangnya masyarakat Indonesia yang demokratis”.

Dari misi dan visi tersebut, sangat jelas bahwa untuk membentuk warga negara yang baik sangat dibutuhkan konsep pendidikan yang demokratis yang diartikan sebagai tatanan konseptual yang menggambarkan keseluruhan upaya sistematis untuk mengembangkan cita-cita, nilai-nilai, prinsip, dan pola perilaku demokrasi dalam diri individu warga negara dalam tatanan iklim yang demokratis.

2.1.2 PKn Dalam Kawasan IPS

Menurut Undang–Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20/2003) menyatakan bahwa satuan pendidikan yang disebut sekolah merupakan bagian dari pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan. Hal ini berarti bahwa pendidikan IPS sebagai bagian dari program pengajaran di SD, baik secara programatik maupun prosedural harus berkaitan dan berkesinambungan dengan pendidikan IPS pada jenjang selanjutnya. Mengacu pada pernyataan di atas, kiranya patut diperhatikan tujuan atau misi utama pendidikan IPS itu. Tujuan atau misi utama pendidikan IPS adalah memanusiakan manusia dan memasyarakatkan secara fungsional dan penuh kesabaran dan penuh tanggung jawab.

Oleh karenanya dalam mengajarkan pendidikan IPS yang harus diperhatikan oleh guru adalah; 1. Kemampuan dalam memberikan pembekalan pengetahuan manusia dan seluk beluk kehidupan dalam astagrata; 2. Membina kesadaran, keyakinan, dan sikap akan pentingnya hidup bermasyarakat dengan penuh rasa kesabaran, bertanggung jawab, dan manusiawi; 3. Membina

keterampilan hidup bermasyarakat dalam negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila, dan; 4. Membina pembekalan dan kesiapan untuk belajar lebih lanjut dan atau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi (Djahiri; 1996: 4). Tujuan pengajaran pendidikan IPS mencakup tiga kemampuan dasar yakni bidang kognitif , afektif , dan psikomotor. Pencapaian tujuan pengajaran bidang kognitif didasarkan pada Taksonomi Bloom. Tujuan kognitif adalah tujuan yang berkenaan dengan ingatan dan pengenalan kembali pengetahuan, perkembangan kemampuan intelektual dan keterampilan intelektual (Bloom, 1956: 7).

Sementara itu tujuan kurikulum pengetahuan sosial pada dasarnya dikembangkan dari falsafah dan teori pendidikan yang dimanifestasikan dalam bentuk tujuan yang pendidikan. Kebutuhan Perkembangan anak didik, baik dilihat dari sudut Psikologis , tuntutan sosial dan budaya yang didasarkan pada dimensi masa lalu, kini, dan masa yang akan datang. Pengetahuan tentang fakta, konsep, generalisasi, teori dan keterampilan dalam proses, kemampuan berfikir serta kemampuan dalam mengambil keputusan adalah tujuan yang dianggap penting dalam kognitif .

Pembelajaran PIPS dilakukan secara terpadu yakni keseluruhan komponen, substansi (material maupun non-material), prosedur, dan proses yang dirancang dengan sengaja, sadar, dan untuk dilaksanakan dalam rangka supaya subjek (peserta didik) dapat belajar. Terpadu yang dimaksud menyangkut seperti apa wujud dan bagaimana mewujudkan konsep pembelajaran yang dimaksud ke dalam keadaan yang terpadu. Keadaan terpadu memiliki ciri

bahwa di dalamnya harus terdapat penyatuan secara fungsional maupun structural antar komponen dan antar substansinya, serta antar tahapan keseluruhan peristiwa belajar yang dikehendaki. Terpadu dalam pengertian ini jelas mengandung arti saling terkait dan terikat satu sama lain dalam mengikuti aturan (fungsi dan struktur) yang direncanakan.

Pendidikan IPS atau studi sosial mengharapkan siswa memperoleh ilmu pengetahuan, dapat mengembangkan kemampuan berfikir dan mampu mengambil keputusan secara kritis, melatih belajar mandiri, serta membentuk kebiasaan – kebiasaan, dan keterampilan – keterampilan seperti melatih diri dalam bertingkah laku seperti yang diinginkan. Pembelajaran Pendidikan IPS diharapkan dapat berkembang pada diri siswa, khususnya kemampuan agar siswa mampu hidup di tengah–tengah masyarakat. Seperti dikemukakan Fenton (1967: 1) bahwa, tujuan studi sosial adalah *“prepare children to be good citizen : social studies teach children how to think and : social studies pass on the cultural heritage”*. (Pembelajaran Pendidikan IPS mendidik anak menjadi warga negara yang baik, mampu berfikir, dan mewariskan kebudayaan kepada generasi penerusnya).

Oleh karena hal tersebut tujuan ini akan dicapai dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. PKn adalah salah satu bentuk pendidikan politik yang tujuannya adalah membentuk warga negara yang baik yaitu warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak – hak dan kewajibannya sebagai individu dan warga negara. Memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial, mampu memecahkan masalah–masalah

kemasyarakatan secara baik dengan fungsi dan perannya (*Socially sensitive, social responsible, socially intelligence*).

Selain itu sebagai warga negara Indonesia yang baik, diharapkan memiliki sikap disiplin pribadi, maupun berfikir kritis, kreatif dan inovatif, agar dicapai kualitas pribadi dan perilaku warga negara dan warga masyarakat yang baik (*Socio civic behavior and desirable personal qualities*). Seorang warga negara yang baik juga harus mematuhi dan melaksanakan hukum dan ketentuan – ketentuan perundang – undangan dengan rasa penuh tanggung jawab, yang tidak merusak lingkungan, tidak mencemari air dan udara di sekitarnya, serta memelihara dan memanfaatkan lingkungannya secara bertanggung jawab.

Henry Randall Waite (1886) seperti dikutip oleh Sumantri (2001: 281) merumuskan pengertian *Civics* sebagai ilmu kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan: (a) perkumpulan yang terorganisir (organisasi sosial, organisasi ekonomi, dan organisasi politik); dan (b) individu dengan negara. Istilah lain yang hampir sama maknanya dengan *civics* adalah *citizenship*.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu dari lima tradisi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yakni *citizenship transmission*, saat ini sudah berkembang menjadi tiga aspek pendidikan Kewarganegaraan (*citizenship education*), yakni aspek akademis, aspek kurikuler, dan aspek sosial budaya. Secara akademis pendidikan kewarganegaraan dapat didefinisikan sebagai suatu bidang kajian yang memusatkan telaaahannya pada

seluruh dimensi psikologis dan sosial budaya kewarganegaraan individu, dengan menggunakan ilmu politik, ilmu pendidikan sebagai landasan kajiannya atau penemuannya intinya yang diperkaya dengan disiplin ilmu lain yang relevan, dan mempunyai implikasi kebermanfaatannya terhadap instrumentasi dan praksis pendidikan setiap warga negara dalam konteks sistem pendidikan nasional (Wiranaputra, 2004).

Ilmu pengetahuan sosial juga membahas hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Lingkungan masyarakat dimana anak didik tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari masyarakat, dihadapkan pada berbagai permasalahan yang ada dan terjadi di lingkungan sekitarnya. Pendidikan IPS berusaha membantu siswa dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi sehingga akan menjadikannya semakin mengerti dan memahami lingkungan sosial masyarakatnya

Berdasarkan pendapat di atas PKn dalam konteks IPS merupakan mata pelajaran yang memusatkan telaahannya pada seluruh dimensi psikologis dan sosial budaya kewarganegaraan individu, dengan menggunakan ilmu politik, ilmu pendidikan sebagai landasan kajiannya atau penemuannya intinya yang diperkaya dengan disiplin ilmu lain yang relevan dimana anak didik tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari masyarakat, dihadapkan pada berbagai permasalahan yang ada dan terjadi di lingkungan sekitarnya.

Tujuan pembelajaran PKn dalam PIPS perlu pendekatan PKn, tidak hanya berorientasi pada tujuan dan isi, melainkan juga menekankan pada proses

pembentukan warga negara yang baik yang lebih mandiri dalam memahami dan mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi serta mampu mengambil keputusan–keputusan yang terbaik bagi dirinya, lingkungan serta masyarakat.

Pembelajaran PKn yang ditekankan adalah terjadinya suatu proses perubahan. Penekanan pada proses akan lebih mengarah pada percepatan pencapaian keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan PKn, dari pada yang menekankan pada hasil , sebab itu keterampilan bagi warga negara dalam membuat atau mengambil keputusan perlu dilatihkan secara terus menerus, agar memiliki keterampilan dalam menegmbangkan berbagai alternatif untuk sampai pada pembuatan keputusan yang tepat. Untuk itu pendekatan–pendekatan yang bersifat desentralisasi/ otonomi pendidikan sudah seharusnya dilaksanakan, khususnya dalam PKn. Kondisi semacam itu harus pula diciptakan di lingkungan masyarakat sehingga tidak terjadi kesenjangan penerapan nilai–nilai dan moral antara apa yang disampaikan di sekolah dengan apa yang terjadi dewasa ini.

Materi pembelajaran PKn selain harus bersifat komprehensif, juga bersifat problematik. Materi bersifat komprehensif artinya materi pengajaran selain mengenai hal yang mengarahkannya kepada memahami hak–hak dan kewajiban sebagai warga negara, juga harus dibekali dengan pengetahuan lain yang dapat membantu memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Untuk itu selain membahas nilai–nilai Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara , siswapun harus dilengkapi dengan materi pelajaran yang dapat

meningkatkan pengetahuan , mengembangkan nilai–nilai keterampilan sebagai warga negara. Hal itu dapat diperoleh melalui hubungan keterkaitan antara PKn dengan ilmu sosial (IPS untuk Pendidikan Dasar dan Ilmu – Ilmu Sosial pada Sekolah Menengah Umum).

Disamping itu suasana pada saat proses pembelajaran berlangsung harus tercipta sedemikian rupa sehingga dapat merubah sikap, dan prilaku serta keterampilan anak didik kearah kedewasaan mental psikologis untuk menjadi manusia Indonesia seutuhnya. PKn memiliki kekhususan dalam materi, tujuan, metode dan teknik yang akan diterapkan. Pada hakikatnya pengajaran PKn adalah proses interaksi dari aspek–aspek kehidupan manusia di masyarakat dan pengajaran PKn merupakan paduan dari berbagai disiplin ilmu sosial yang telah diolah, diseleksi sedemikian rupa untuk kepentingan anak didik. Sedangkan PIPS sebagai bidang pengetahuan yang digali dari kehidupan praktis sehari – hari di dalam masyarakat dengan menggunakan pendekatan interdisipliner.

2.1.3 Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

2.1.3.1 Pengertian Belajar

Belajar merupakan proses yang terus terjadi secara berkesinambungan dalam kehidupan manusia baik dilakukan secara sadar atau tidak sadar. Belajar adalah ”merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mendengarkan, meniru, dan lain sebagainya” (Sardiman ,2005: 20).

Sebagaimana dikatakan Arikunto (1993: 19) bahwa: "belajar diartikan sebagai suatu proses yang terjadi karena adanya usaha untuk mengadakan perubahan dalam diri manusia yang melakukan, dengan maksud memperoleh perubahan dalam dirinya baik berupa pengetahuan, keterampilan maupun sikap". Perubahan tingkah laku tidak akan terjadi tanpa adanya usaha yang dilakukan oleh siswa. Usaha tersebut merupakan aktivitas belajar siswa. Aktivitas merupakan asas yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran, sebagaimana dikatakan Sardiman (2004: 95) bahwa: "aktivitas belajar merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar".

Menurut Hamalik (1983: 24-25) bahwa segala kegiatan belajar yang dilakukan seseorang yang berupa kegiatan mendengarkan, merenungkan, menganalisa, berpikir, membandingkan, dan menghubungkan dengan masa lampau.

Menurut Trursan Hakim (2000: 01) mengatakan bahwa " belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia dan perubahan tersebut di tempatkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan pengetahuan, sikap, pemahaman, daya pikir dan pengetahuan "

Menurut Gagne (1984: 12) belajar didefinisikan sebagai suatu proses dimana suatu organisme berubah perilakunya akibat suatu pengalaman. Galloway dalam Toeti Soekamto (1992: 27) mengatakan belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi dan faktor-faktor lain berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya.

Sedangkan Morgan menyebutkan bahwa suatu kegiatan dikatakan belajar apabila memiliki tiga ciri-ciri sebagai berikut:

1. Belajar adalah perubahan tingkahlaku.
2. Perubahan terjadi karena latihan dan pengalaman, bukan karena pertumbuhan.
3. Perubahan tersebut harus bersifat permanen dan tetap ada untuk waktu yang cukup lama.

“Belajar adalah proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seseorang seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir dan lain-lain kemampuan” (Thursan Hakim, 2005: 1).

Pembelajaran adalah proses membuat orang belajar. Guru bertugas membantu orang belajar dengan cara memanipulasi lingkungan sehingga siswa dapat belajar dengan mudah, artinya guru harus mengadakan pemilihan terhadap berbagai strategi pembelajaran yang ada, yang paling memungkinkan proses belajar siswa berlangsung optimal. Dalam pembelajaran proses belajar tersebut terjadi secara bertujuan dan terkontrol.

Berdasarkan defenisi diatas, yang sangat perlu digaris bawahi adalah bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seseorang diperlihatkan dalam bentuk bertambahnya kualitas dan kuantitas kemampuan orang itu dalam berbagai bidang.

Beberapa aktivitas belajar adalah:

- a. Mendengarkan
- b. Memandang
- c. Meraba, membau, dan mencicipi/ mencecap
- d. Menulis atau mencatat
- e. Membaca
- f. Membuat ikhtisar atau ringkasan dan menggarisbawahi
- g. Mengamati tabel-tabel, diagram-diagram dan bagan-bagan
- h. Menyusun paper atau kertas kerja
- i. Mengingat
- j. Berpikir
- k. Latihan dan praktek

Meskipun orang mempunyai tujuan tertentu dalam belajar serta telah memilih sikap yang tepat untuk merealisasikan tujuan itu, namun tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan itu sangat dipengaruhi oleh situasi. Setiap situasi dimanapun dan kapan saja memberikan kesempatan belajar kepada seseorang. Berikut ini prinsip-prinsip belajar yang perlu diperhatikan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam belajar adalah prinsip-prinsip belajar.

Adapun prinsip-prinsip belajar tersebut sebagai berikut :

- a. Belajar harus berorientasi pada tujuan yang jelas.
- b. Proses belajar akan terjadi apabila seseorang dihadapkan pada situasi problematis.

- c. Belajar dengan pengertian akan lebih bermakna dari pada belajar dengan hafalan.
- d. Belajar merupakan proses kontinu.
- e. Belajar memerlukan kemampuan yang kuat.
- f. Keberhasilan ditentukan oleh banyak factor.
- g. Belajar memerlukan metode yang tepat.
- h. Belajar memerlukan adanya kesesuaian antara guru dan murid.
- i. Belajar memerlukan kemampuan dalam menangkap intisari pelajaran itu sendiri.

(Thursan Hakim, 2005: 2)

“Belajar adalah suatu perubahan didalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari reaksi yang berupa kecakapan, sikap. Kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian.” (Witherington, dalam buku Dalyon, 1997: 211).

Perwujudan perilaku belajar biasanya lebih sering tampak dalam perubahan-perubahan sebagai berikut :

1. Kecakapan.
2. Keterampilan.
3. Pengamatan.
4. Berpikir asosiatif dengan daya ingat.
5. Berfikir rasional.
6. Sikap.
7. Inhibisi.
8. Apresiasi.
9. Tingkah laku efektif.

(Dalyon, 1997: 213)

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku seseorang yang diperlihatkan dalam bentuk perubahan tingkah laku yang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, maka belajar dapat disimpulkan juga sebagai suatu serangkaian proses kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman melalui interaksi dengan lingkungannya dengan tujuan perubahan tingkah laku kearah yang lebih baik.

2.1.3.2 Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran merupakan proses belajar yang dialami siswa. Pengalaman belajar siswa juga bisa didapatkan dari berbagai informasi seperti tulisan-tulisan, didapatkan dari gambar-gambar yang berkaitan dengan materi belajar, dan juga bisa didapatkan dari siaran televisi atau gambaran atas gabungan beberapa objek secara fisik dimana guru akan memberikan arahan atau aturan untuk memandu siswa tersebut.

Sugiartini dalam Ristina (2009: 15) mengemukakan mengenai pembelajaran sebagai berikut:

Pembelajaran dapat diartikan sebagai upaya yang sistemik dan disengaja untuk menciptakan kondisi-kondisi agar terjadi kegiatan belajar membelajarkan. Dalam kegiatan itu terjadi interaksi antara kedua belah pihak, yaitu peserta didik (warga belajar) yang melakukan kegiatan belajar, dengan pendidik (sumber belajar) yang melakukan kegiatan membelajarkan.

Disimpulkan bahwa pembelajaran itu merupakan proses interaksi belajar mengajar antara kedua belah pihak, yaitu antara siswa dan guru guna

terjadinya perubahan, pembentukan, dan diharapkan nantinya memiliki pola perilaku yang lebih baik ke depan. Pembelajaran juga merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan yang merupakan keberhasilan guru dan siswa.

Silberman (2002: XXVI) bahwa teknik-teknik pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran dirancang untuk bagaimana mendorong para peserta didik dengan lembut untuk berpikir, merasakan, dan menerapkan, yang termasuk di dalamnya adalah:

- a. *Full-class learning* (belajar sepenuhnya di dalam kelas) Petunjuk dari pengajar yang merangsang seluruh kelas.
- b. *Class-discussion* (diskusi kelas) Dialog dan debat mengenai pokok-pokok bahasan utama.
- c. *Question prompting* (Cepatnya pertanyaan) Siswa meminta klarifikasi penjelasan.
- d. *Collaborative learning* (belajar dengan bekerja sama) Tugas-tugas dikerjakan dengan kerja sama dalam kelompok-kelompok kecil peserta didik.
- e. *Peer teaching* (belajar dengan sebaya) Petunjuk diberikan oleh peserta didik.
- f. *Independent learning* (belajar mandiri) Aktivitas-aktivitas belajar dilakukan secara individual.
- g. *Affective learning* (belajar afektif) Aktivitas-aktivitas yang membantu peserta didik untuk menguji perasaan-perasaan, nilai-nilai dan perilaku mereka.
- h. *Skill development* (pengembangan keterampilan) Mempelajari dan mempraktikkan keterampilan-keterampilan, baik teknis maupun non teknis.

Dengan demikian, pembelajaran dapat meliputi segala pengalaman yang diaplikasikan guru kepada siswanya. Makin intensif pengalaman yang dihayati peserta didik maka kualitas pembelajarannya pun semakin tinggi. Intensitas pengalaman belajar ini dapat dilihat dari tingginya keterlibatan siswa dalam proses belajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas.

2.1.3.3 Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Semua pendidikan yang dirancang tentulah mempunyai tujuan nasional, tujuan pendidikan khusus (misalnya pendidikan tinggi), tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Tujuan-tujuan itu semua dibuat berdasarkan suatu rumusan yang jelas dan terukur bermuara pada perubahan-perubahan segi sistem berfikir, pengetahuan, keterampilan dan sikap anak didik seperti apa yang hendak dicapai setelah mereka berhasil dengan baik menyelesaikan pendidikannya.

Upaya utama yang dapat mencapai perubahan-perubahan segi sistem berfikir, pengetahuan, keterampilan dan sikap anak didik antara lain ialah melalui proses belajar-mengajar (pembelajaran) dan kegiatan akademik lainnya baik yang direncanakan maupun spontan.

Mengusahakan terciptanya kondisi dan situasi yang kondusif yang menunjang berlangsungnya kegiatan pembelajaran yang tenang dalam lingkungan sekolah adalah tanggung jawab semua warga sekolah. Namun pengaruh guru pada perubahan-perubahan segi sistem berfikir, pengetahuan, keterampilan dan sikap anak didik amatlah besar karena berlangsung atau tidaknya proses pembelajaran (belajar-mengajar) secara benar, bergantung pada pribadi dan tingkat kecerdasan guru, sedangkan unsur lainnya berfungsi sebagai penunjang belaka.

Demikian halnya dengan proses pembelajaran (belajar-mengajar) PKn, proses pembelajaran PKn adalah proses menyampaikan, menanamkan,

mengembangkan, dan mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 kepada anak didik agar menjadi manusia dan warga Negara Indonesia yang berkarakter dan demokratis.

Berdasarkan Paradigma Baru PKn yang dituangkan dalam Standar Proses PKn (2006: 95), Proses pembelajaran PKn memuat uraian tentang :

1. Tujuan (*instructional objectives*) mata pelajaran yang dirumuskan berupa ramuan dari sumber bahan yang diangkat dari rasionel program.
2. Pengalaman belajar (*learning experiences*) yang direncanakan baik menyangkut bidang teori, praktikum maupun pengalaman di lapangan.
3. Topik dan Sub-topik yang akan disajikan, yang dianggap penting dan esensial sebagai bahan ajar (*instructional materials*) yang akan dijadikan pembekalan yang cocok untuk pelaksanaan spektrum tugas mendukung kompetensi yang diharapkan.
4. Cara dan Teknik penyajian (*course offering style*) yang dipilihkan dan serasi dengan sifat dan cirri bahan ajar.
5. Takaran waktu yang dianggap memadai untuk penyajian bahan ajar baik yang bersifat klasikal, laboratorer maupun kerja lapangan (*field work*) dan,
6. Bahan sumber yang cocok sebagai buku-dasar (*text book*), maupun referensi guna pengayaan (*enrichment*) melengkapi bahan ajar.

Mata pelajaran PKn merupakan bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di sekolah dan diterima sebagai wahana utama serta esensi pendidikan demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan melalui:

Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaran pasca KBK (Standar isi BSNP):

- a. *Civics Intellegence*, yaitu kecerdasan dan daya nalar warga negara baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional maupun sosial.
- b. *Civics Responsibility*, yaitu kecerdasan akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab, dan

- c. *Civics Participation*, yaitu kemampuan berpartisipasi warga negara atas dasar tanggung jawabnya, baik secara individual, sosial, maupun sebagai pemimpin hari depan.

Hakikat mata pelajaran PKn merupakan suatu upaya untuk mengartikan, menyalurkan, dan membina peran warga negara dari berbagai aspek kehidupan agar terbentuk sebagai warga negara yang baik yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. serta memiliki tujuan dan program yang sejalan dengan upaya pembentukan manusia dan warga negara Indonesia yang berkarakter dan demokratis. Maka PKn memiliki peranan yang sangat besar dalam penanaman nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, pembelajaran PKn diharapkan dapat mentransformasikan, menanamkan, mengembangkan, serta mempertahankan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

2.1.3.4 Pengertian Umum Model Pembelajaran

Model pembelajaran adalah pedoman berupa program atau petunjuk strategi mengajar yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Pedoman itu memuat tanggung jawab guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Salah satu tujuan dari penggunaan model pembelajaran adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa selama belajar. Model pembelajarn itu pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain model pembelajaran merupakan bungkus

atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode dan teknik pembelajaran.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan model pembelajaran adalah “cara yang teratur dan terpicik baik-baik untuk mencapai maksud di dalam ilmu pengetahuan, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan”. (Depdikbud, 1988: 580).

Dengan demikian sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar, bahwa model pembelajaran adalah cara mengajar, artinya menciptakan situasi belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran (Depdikbud, 1994: 4).

Menurut Dorin, Demmin dan Gabel (1990: 12) dalam Ella Yulaelawati (2004: 50) “Sebuah model merupakan gambaran mental yang membantu kita menjelaskan sesuatu yang lebih jelas terhadap sesuatu yang tidak dapat dilihat atau dialami secara langsung.”

Sedangkan menurut Ryder (2003: 33) dalam Ella Yulaelawati (2004: 56), “Model seperti mitos dan metaphor yang dapat membantu kita memahami sesuatu. Apakah model itu diturunkan oleh seseorang atau merupakan hasil dari penelitian, setiap model menawarkan pemahaman tertentu secara lebih mudah.”

Selanjutnya menurut Trianto (2007: 3) model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pengajaran dan para guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar.

Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah suatu pola pemikiran yang disajikan secara utuh. Model dapat berupa skema, bagan, gambar dan tabel, karena didalam sebuah model menjelaskan keterkaitan berbagai komponen dalam suatu pola pemikiran yang disajikan secara utuh dan dapat membantu kita melihat kejelasan dan keterkaitan secara lebih cepat, utuh, konsisten dan menyeluruh.

2.1.3.5 Model Pembelajaran PKn

Proses pembelajaran adalah konteks interaktif dimana paras siswa terlibat dalam berbagai pengalaman belajar (*learning experiences*) yang memungkinkan perkembangnya kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik dengan pengarahan guru. Dalam proses tersebut sekurang-kurangnya terpaut dua persoalan pokok kurikuler yakni “apa yang dapat dipelajari” dan “bagaimana hal itu dapat dipelajari”. persoalan pertama menunjuk pada isi (*content*) dan kedua menunjuk pada aktivitas (*process*) kedua hal tersebut tidak bias dipisahkan. Dalam banyak hal isi menentukan proses, akan tetapi juga dalam kesempatan lain proses mewarnai isi.

Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode dan tehknik pembelajaran.

Esensi tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang didukung oleh model-model yang berorientasi pada pembinaan pribadi ialah “penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila”. Dalam kerangka konsep “*Confluent taxonomy*” proses penghayatan dan pengamalan ini tidak terlepas dari proses penalaran. Karena itu penerapan model-model pembinaan pribadi merupakan salah satu sarana bagi terbinanya pribadi siswa yang mencerminkan esensi nilai moral Pancasila.

Sedangkan menurut Udin Saripuddin (1989: 127) dalam Joyce dan Weil (1986) mengelompokkan model-model pembelajaran sebagai berikut :

1. Kelompok model pengolahan informasi atau “*The Information Processing Family*”.
Model pembelajaran pengolahan informasi menitik beratkan pada cara-cara memperkuat dorongan-dorongan internal untuk memahami dunia ini dengan cara menggali dan mengorganisasikan data, merasakan adanya masalah dan mengupayakan jalan pemecahannya dan mengembangkan bahasa untuk mengungkapkannya. beberapa model dalam kelompok ini memberikan kepada siswa sejumlah konsep, sebagian lagi menitikberatkan pada pembentukan konsep, dan pengetesan hipotesis, dan sebagian lainnya memusatkan perhatian pada pengembangan kemampuan kreatif.
2. Kelompok model personal atau “*The Personal Family*”.
Model personal beranak dari pandangan kedirian atau “*selfhood*” dari individu. Proses pendidikan sengaja diusahakan untuk memungkinkan siswa dapat memahami diri sendiri dengan kelompok model personal memusatkan perhatian pada pandangan perorangan dan berusaha menggalakkan kemandirian yang produktif, sehingga manusia menjadi sadar diri dan bertanggung jawab atas tujuannya.
3. Kelompok model sosial atau “*The Social Family*”.

- Kelompok model sosial ini dirancang untuk memanfaatkan kerjasama. Dengan kerjasama dapat membangkitkan dan menghimpun tenaga atau “*energy*” secara bersama yang kemudian disebut “*synergy*”
4. Kelompok model sistem prilaku “*The Behavioral Family*”.
 Dasar teoritik umum dari kelompok model ini adalah teori-teori belajar social “*social learning theoris*”. Model ini dikenal pula sebagai model modifikasi prilaku atau “*Bihavioral Modification*”. Terapi prilaku atau “*Behavioral The Therapy*”, dan Sibernetika atau “*Cybernetics*”. Dasar pemikiran dari kelompok model ini ialah sistem komunikasi yang mengoreksi sendiri yang memodifikasi prilaku dalam hubungannya dengan bagaimana tugas-tugas dijalankan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, model ini memusatkan perhatian pada prilaku yang terobservasi atau “*overt bahavior*”, dan metode dan tugas yang diberikan dalam rangka mengkomunikasikan keberhasilan.

Khusus mengenai pendidikan kewarganegaraan (PKn) Simon, Howe, dan Kirchenbaum (1972), (dalam Udin Saripuddin 1989: 130) mengajukan empat model umum yakni :

1. Model Penanaman Moral atau (*Moral Inculcation*).

Secara langsung dengan asumsi bahwa dalam setiap masyarakat terdapat nilai atau moral yang secara terus menerus telah dipraktekkan dan dites melalui pengalaman. Atas dasar asumsi itu, maka para pemuda atau generasi baru harus dibekali dengan paket nilai-nilai moral itu melalui proses transfer secara langsung.

2. Moral Transmisi Nilai

Asumsi dibalik model ini adalah tidak ada sistem nilai yang baik bagi setiap orang, karena manusia harus menguji dan memilih sendiri perangkat nilai yang dianggap cocok. Atas dasar itu maka para pemuda seyogyanya diberi kebebasan untuk berfikir dan menetapkan sendiri apa yang mau dilakukannya tanpa campur tangan orang dewasa.

3. Model Tauladan atau Modeling

Dengan asumsi penting sebagai orang dewasa harusnya menampilkan dirinya sendiri sebagai tauladan. Para pemuda akan melihat sendiri perilaku dan nilai yang dijunjung tinggi oleh orang dewasa dan pada akhirnya akan mengadopsi nilai dan perilaku itu melalui proses imitasi secara sadar.

4. Model Klarifikasi Nilai

Yang bertolak dari proses "*Valuing*" dimana manusia memegang kepercayaan dan membangun perilaku atas dasar kepercayaan itu. Model ini memiliki 7 (tujuh) proses sebagai berikut :

a. Bangga atas kepercayaan dan perilaku :

1. Menunjukkan rasa senang dan bangga
2. Menyatakannya pada orang lain

b. Memilih kepercayaan dan perilaku

3. Memilih dari berbagai alternatif
4. Memilih setelah menguji dan mempertimbangkannya
5. Memilih dengan leluasa/bebas

c. Bertindak atas dasar kepercayaan itu

6. Bertindak
7. Bertindak atas dasar suatu pola secara berulang-ulang dengan tetap/konsisten.

Dari berbagai alternatif model tersebut di atas, dapat dikelompokkan lagi model-model itu menjadi :

A. Model Yang Berorientasi Pada Penalaran Moral

Esensi tujuan pendidikan kewarganegaraan yang didukung oleh kelompok model belajar mengapa yang berorientasi pada penalaran moral ialah “pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila”. Dimensi pemahaman yang merupakan bagian integral dari proses penalaran atau proses kognitif merupakan salah satu prasyarat bagi tumbuhnya proses penghayatan nilai/moral. Yang termasuk atau dapat dimasukkan kedalam model kelompok ini ialah model-model pengolahan informasi dengan menekankan pada konsep dan nilai moral Pancasila, model-model klarifikasi nilai dan model-model lain yang menitikberatkan pada proses penalaran mengenai isu moral dalam kehidupan sehari-hari.

Secara singkat model-model yang termasuk kategori di atas, adalah sebagai berikut :

1. Model pencapaian konsep nilai/moral
2. Model berfikir induktif mengenai nilai moral atau “*Inductive Thinking*”
3. Model latihan penelitian masalah nilai moral atau “*Inquiry Training*”
4. Model pemandu awal atau “*Advance Organizers*”
5. Model memorisasi “*Memorization*”
6. Model pengembangan intelek “*Developing Intellect*”.
7. Model penelitian ilmiah “*Scientific inquiry*”.

B. Model Yang Berorientasi Pada Interaksi Sosial.

Esensi tujuan pendidikan kewarganegaraan yang didukung oleh model-model interaksi sosial ini ialah” penghayatan dan pengamalan nilai-nilai pancasila”. Tentu saja tujuan ini tidak dapat dipisahkan dari esensi proses pemahaman/penalaran. Lebih-lebih karena secara konseptual progmatic pendidikan kewarganegaraan telah menerapkan konsep “*Confluent taxonomy*”.

Yang perlu dicatat bahwa titik berat model-model interaksi sosial ini adalah pada proses latihan menghayati hakikat nilai/moral melalui proses perlibatan langsung dalam proses-proses simulatif atau situasi sebenarnya. Dengan demikian penerapan model-model interaksi sosial ini juga merupakan sarana dan media penerapan konsep “*confluent taxonomy*” dalam pendidikan kewarganegaraan.

Secara singkat model-model yang termasuk kategori model di atas, sebagai berikut :

1. Model investigasi kelompok “*Group Investigation*”
2. Model bermain peran “*Role Playing*”
3. Model penelitian yurisprudensi “*Jurisprudential Inquiry*”
4. Model latihan laboratoris “*Laboratory Training*”.
5. Model penelitian sosial “*Social Science Inquiry*”.

C. Model Yang Berorientasi Pada Pembinaan Pribadi

Esensi tujuan pendidikan kewarganegaraan yang didukung oleh model-model yang berorientasi pada pembinaan pribadi ialah “penghayatan dan

pengamalan nilai-nilai pancasila”. Dalam kerangka konsep “*Cofluent taxonomy*” proses penghayatan dan pengamalan ini tidak terlepas dari proses penalaran. Karena itu penerapan model-model pembinaan pribadi merupakan salah satu sarana bagi terbinanya pribadi siswa yang mencerminkan esensi nilai moral pancasila.

Jika dikembalikan kepada postulat pendidikan kewarganegaraan dari Piaget yang dipakai juga oleh Kohlberg (1975), model pembinaan pribadi akan memberi andil besar dalam membina keadaan bahwa perilaku manusia terikat akan norma yang berlaku . oleh karena itu harus ditumbuhkan dalam diri siswa, kualitas pribadi, dalam hal ini komitmen individu terhadap nilai-nilai moral.

Disamping kategori model ini meliputi model-model personal menurut Joyce dan Weil (1986) juga dapat ditambahkan model tauladan/Modeling dari Simon et-al (1972), “*Observation and Involvement in Model Issues*” dari Arbuthnot dan Faust (1981: 200-203).

Beberapa model yang termasuk dalam kategori model di atas, adalah sebagai berikut :

1. Model pembelajaran tanpa arahan “*Non Directive Teaching*”.
2. Model sinektiks “*Synectics Model*”.
3. Model latihan kesadaran “*Awareness Training*”.
4. Model Pertemuan kelas “*Classroom meeting*”.

D. Model Yang Berorientasi Pada Sistem Prilaku

Esensi tujuan pendidikan kewarganegaraan yang didukung oleh model-model yang berorientasi pada sistem prilaku ialah ”pengamalan nilai-nilai pancasila” yang tentunya dilandasi oleh pemahaman dan penghayatan atas nilai moral pancasila. Walaupun dinyatakan bahwa prilaku moral tidaklah konstan kerana bersifat kontekstual, akan tetapi prilaku yang dilandasi pemahaman dan penghayatan tentu dapat dianggap lebih utuh. Oleh karena itu pembinaan prilaku sama pentingnya dengan pembinaan kognisi dan sikap.

Beberapa model yang termasuk model ini dengan memberi konteks pendidikan kewarganegaraan sebagai berikut :

1. Model belajar tuntas, pembelajaran langsung, dan teori belajar sosial “*Master Learning, Direct Instruction, and Social Learning Theory*”.
2. Model belajar kontrol diri “*Learning Self-Control*”.
3. Model latihan ketrampilan dan pengembangan konsep “ *Training for Skills and Concept Development*”.
4. Model latihan Asertif “*Assertive Training*”.

Menurut Bruce Joyce dan Marsha Weil (dalam Abdul Aziz Wahab 2007: 59) ada 4 modifikasi tingkah laku model pembelajaran, yaitu :

1. Model Interaksi Sosial

Model ini menunjukkan pentingnya hubungan sosial yang berkembang pada proses interaksi sosial diantara individu. Model interaksi sosial adalah dimaksudkan sebagai upaya memperbaiki

masyarakat dengan memperbaiki-memperbaiki hubungan interpersonal melalui prosedur demokrasi.

2. Model Pengolahan Informasi

Model-model tersebut menekankan pada cara siswa memperoleh informasi. Tujuan utama dari model-model kategori ini adalah membantu siswa mengembangkan metode atau cara-cara memproses informasi yang diperoleh dari lingkungannya. Model-model ini juga menjelaskan cara memproses informasi dengan pendekatan yang berbeda.

3. Model Personal Humanistic

Model-model dalam kelompok ini memusatkan perhatiannya pada individu dan kebutuhannya. Individu dibantu melalui upaya menciptakan lingkungan yang merangsang agar individu tersebut merasa nyaman untuk melaksanakan tugas-tugasnya dan mengembangkan kemampuannya sampai pada tingkat yang optimum bagi kesejahteraan masyarakat. Keseluruhan model-model tersebut berusaha memahami sifat-sifat individu guna meningkatkan pribadi dan kemampuannya serta menghubungkan dengan hal-hal produktif lainnya.

4. Model Modifikasi Tingkah Laku

Menurut B.F Skinner perilaku itu adalah sesuatu yang dialami dan sah yang dipengaruhi variabel-variabel eksternal tersebut. Tugas guru dalam model ini adalah menetapkan perilaku yang kompleks dan

menempatkan perilaku kelas tersebut di bawah pengendalian gambaran khusus lingkungan.

Sedangkan menurut Joice dan Weil model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang) merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain.

Jadi dapat disimpulkan model pembelajaran adalah pola atau strategi yang dijadikan sebagai pedoman untuk perbaikan kegiatan pembelajaran guna untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dibuat oleh guru. Dari beberapa model yang telah diuraikan di atas, dapat bahwa semua model penanaman nilai moral seperti dijelaskan di atas dapat dijadikan alternatif dan dapat digunakan pada tingkat SMP sebagai pilihan dalam proses pembelajaran PKn, hanya saja dalam tataran pelaksanaan di kelas disesuaikan dengan jenjang dan karakteristik peserta didik, kebutuhan siswa.

2.1.3.6 Tinjauan Tentang Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Program Pembelajaran PKn

A. Perencanaan Program PKn

Wursanto (1990: 12) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses pemikiran secara rasional dan penetapan secara tepat mengenai berbagai macam hal yang akan dikerjakan dimasa mendatang dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Bintoro Tjikroaminoto (1979: 8), berpendapat bahwa perencanaan dilakukan dengan dasar agar kegiatan tersebut dapat lebih teratur. Dengan demikian perencanaan diarahkan pada :

- a. Penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien
- b. Keperluan mendobrak kearah perubahan struktural ekonomi dan sosial masyarakat.
- c. Arah perkembangan untuk keadilan sosial.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan sangat dibutuhkan dalam setiap kegiatan atau program agar dapat lebih teratur dan dapat berjalan dengan baik, sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Jadi perencanaan mencakup pembuatan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan sesuatu sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Tahap-Tahap Perencanaan

Secara lebih terperinci dapat diklasifikasikan tahap-tahap dalam suatu proses perencanaan. Tahap-tahap tersebut menurut Bintoro Tjikroaminoto (1979: 9), adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rencana terdiri dari unsur-unsur :
 1. Tinjauan keadaan dapat berupa tinjauan sebelum memulai suatu rencana atau tinjauan keadaan tentang proses pelaksanaan rencana sebelumnya.
 2. Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana
 3. Penetapan tujuan rencana dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana tersebut.
 4. Identifikasi kebijakan dan atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana.

5. Tahap persetujuan perencanaan, dalam hal ini diusahakan pula penyelesaian dengan perencanaan pembiayaan.
- b. Penyusunan Program Rencana
- c. Pelaksanaan Rencana
- d. Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana
- e. Tahap Evaluasi

Untuk merancang program pendidikan kewarganegaraan sesuai dengan kesiapan atau “*readiness*” seyogyanya ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Baik tahapan Piaget maupun tahapan moral perlu diuji terlebih dahulu dengan tes yang relevan. Setelah tahapan kedua itu diuji individu dibagi menjadi kedalam kelompok yang dapat memperoleh dan tindakan memperoleh pengaruh dari program pendidikan kewarganegaraan.
2. Jika sekolah tidak mungkin dapat memberikan layanan pendidikan moral, hanyalah mereka yang memang dapat dipengaruhi yang dimasukan kedalam kelompok percobaan itu.

Kedua hal tersebut di atas berlaku dalam merancang program pendidikan kewarganegaraan yang di uji cobakan. Jika terdapat anak yang secara psikologis belum siap ditingkatkan taraf moralitasnya, sebaiknya ditunggu sampai anak tersebut mendapat taraf lebih maju dalam penalarannya. Hal ini memerlukan tenaga yang terlatih dalam proses ini, yang menyadari betul prosedur yang harus ditempuhnya. Selain itu terdapat hambatan lain karena baik taraf penalaran maupun taraf moralita tidak bisa diajarkan secara langsung. Oleh karena itu harus dicatat bahwa “*readiness*” untuk berkembang bukanlah kondisi yang stabil. Kesemuanya hal itu memang

disadari sangat sukar untuk dipraktekkan oleh guru pendidikan kewarganegaraan yang baru dan atau belum berpengalaman. Oleh karena itu sejak dini di lembaga pendidikan guru pendidikan kewarganegaraan, sebaiknya sudah dikenalkan kepada konsep-konsep di atas.

Program pendidikan kewarganegaraan yang dirancang dengan menggunakan pendekatan perkembangan moral memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut : (Arbuthnot & Faust, 1981: 139-143).

1. Memberi kemudahan perkembangan

Prinsip pertama pendidikan kewarganegaraan ialah memberi suasana dan kemudahan bagi naiknya taraf moralitas kearah yang lebih tinggi. Dengan kata lain pendidikan kewarganegaraan harus dapat meningkatkan kematangan dalam penalaran moral.

2. Menciptakan disequilibrasi

Prinsip ini memberi makna bahwa perkembangan moral dirangsang atau ditantang dengan cara menciptakan konflik penalaran (*Cognitive Conflict*) atau disequilibrasi, dan bukan dengan cara mengajarkan tahapan moralitas secara langsung.

3. Peranan pendidik

Prinsip ketiga ini mengandung pengertian bahwa peranan pendidik ialah merencanakan pengalaman yang dapat merangsang proses penemuan sendiri tahap penalaran yang lebih tinggi. Dalam konteks ini pendidikan kewarganegaraan tidak menganut pembelajaran langsung dengan cara menceramahi murid bagaimana menanggapi sesuatu dengan taraf penalaran yang lebih tinggi. Strategi yang tepat untuk

pendidikan kewarganegaraan ialah merangsang para siswa untuk meningkatkan penalaran moralnya dengan cara mengajukan pertanyaan yang sesuai dan memberi pengalaman belajar yang juga sesuai.

4. Rujukan etis

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa hak-hak perseorangan harus dilindungi selama berlangsungnya proses pendidikan kewarganegaraan. Hal ini termasuk hak untuk turut secara aktif atas dasar pengakuan yang nyata, dan hak untuk memilih dan menginternalisasi suatu sistem nilai atau kepercayaan tanpa rasa takut atau terpaksa.

B. Pelaksanaan Pembelajaran PKn

Komarudin (1981: 15) mengemukakan bahwa dalam menghadapi masalah haruslah dilakukan suatu perlakuan yang berdasarkan ketrampilan dan pendidikan yang tinggi guna mencapai tujuan. Mencapai hal tersebut haruslah diikuti dengan kesadaran dari para pelaksananya, yang ditandai dengan tingkat rasionalitas sebagai aktivitas yang bertujuan untuk mempertinggi realisasi pencapaian tujuan secara terkoordinasi dan terencana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia secara sadar dengan didasari dengan tingkat pendidikan dan ketrampilan guna mencapai tujuan sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan, namun semua itu harus menerapkan sistem koordinasi agar antar pelaksana kegiatan satu dengan yang lain tidak tumpang tindih. Dengan kata lain, pelaksanaan itu mengandung aktivitas yang dilakukan berdasarkan ketentuan pada perencanaan.

Menurut Arbuthnot dan Faust (1981: 145) prosedur pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang terbagi dalam beberapa tahapan dan serta yang sesuai dengan prinsip-prinsip pendekatan perkembangan moral adalah sebagai berikut :

- Tahap I Membentuk kelompok atas dasar hasil pengujian penalaran.
- Tahap II Memilih dan menyiapkan dilemma moral atau konflik moral
- Tahap III Menciptakan situasi psikologis yang sesuai
- Tahap IV Memulai diskusi dengan menyajikan dilemma, menggali pendapat awal, mengorganisasikan dialog antara pemilih tahap moralita rendah dan tinggi atau pemilih tahap + I
- Tahap V Membimbing diskusi ke tingkat yang lebih tinggi dengan membuat disequibrasi dan argumentasi + I
- Tahap VI Mengakhiri diskusi.

Dalam memilih dilemma, perlu ditempuh prosedur sebagai berikut :

1. Memilih dilemma yang memiliki atau memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Terbuka bagi elaborasi tambahan.
 - b. Berisikan konflik moral yang murni.

- c. Sesuai dengan kemampuan intelektual siswa.
 - d. Merangsang perbedaan pendapat antar pemilih tahap moral yang berbeda.
 - e. Menarik.
2. Mempersiapkan dilemma dengan cara sebagai berikut :
 - a. Mengantisipasi tanggapan siswa.
 - b. Membuat elaborasi yang dapat menciptakan pertentangan pendapat antar individu dari berbagai tahapan moral.
 - c. Mempersiapkan sekurang-kurangnya dua pendapat sanggahan untuk setiap tahap.

Adapun tujuan pemilihan dan penyiapan dilemma antara lain untuk :

- a. Menciptakan konflik penalaran
- b. Memberikan rangsangan untuk terjadinya diskusi.

Dalam menciptakan situasi yang sesuai perlu ditempuh dengan beberapa prosedur sebagai berikut :

1. Pada saat mendiskusikan alasan dan tujuan :
 - a. Menyesuaikan tahap pengajian sesuai dengan kemampuan intelektual siswa.
 - b. Memasukkan rincian tujuan dan alasan yang mendasari pendidikan moral.
 - c. Membatasi pengajian agar tidak terperosok pada pengajian yang normal.
2. Pada saat mendiskusikan peranan siswa dalam kelompok guru harus menjelaskan kepada siswa antara lain hal-hal sebagai berikut :

- a. Esensi ceritera dilemma moral yang akan didiskusikan.
 - b. Bahwa diskusi sebagian besar terserah pada siswa.
3. Pada saat menjelaskan peranan guru pada kelompok kemukakan juga beberapa hal yang harus diketahui oleh siswa bahwa :
- a. Siswa tidak akan dinilai dan guru tidak akan mencari pemecahan.
 - b. Guru tidak akan memberi jawaban yang benar.
 - c. Guru akan memberi kemudahan jika memang diperlukan.
4. Pada saat memaparkan rujukan etis dalam partisipasi ada yang perlu ditekankan dan dijelaskan yaitu :
- a. Jelaskan pentingnya sikap saling menghargai dan perlunya menghindari perilaku yang tidak konsisten.
 - b. Tekankan adanya kebebasan individual termasuk kebebasan dalam kepercayaan dan kebebasan menentukan partisipasi.

Prosedur tersebut ditempuh untuk dapat menciptakan espektasi dan pengertian tentang diskusi kelompok. Termasuk didalamnya dalam rangka menjelaskan rasional dan tujuan, peranan siswa, peranan guru, dan rujukan etis.

Dalam memulai dan memelihara jalannya diskusi perlu diperhatikan dan ditempuh beberapa prosedur sebagai berikut :

1. Membacakan dilemma kepada kelompok sampai isinya dapat benar-benar dipahami oleh siswa.
2. Secara bergiliran setiap anggota memberikan pendapatnya dengan cara sebagai berikut :

- a. Siswa dapat menyatakan terus jika ia memilih,
 - b. Mencatat respon dalam pernyataan sederhana,
 - c. Mem-probing untuk melacak penalaran yang tersembunyi.
3. Mengorganisasikan situasi dialogis antara pemilih tahap moral tinggi dan rendah, dengan cara :
- a. Jika ada kesamaan pendapat, beri elaborasi baru agar ada yang mau merubah posisinya sehingga terjadi diskusi.
 - b. Jika terjadi perbedaan pendapat biarkanlah terjadi dalam masing-masing tahap untuk mendiskusikannya.
 - c. Jika tahapan respon tidak bisa ditentukan diskusikan dalam dua kelompok yang memiliki perbedaan pandangan.
 - d. Jika kelompok tidak dapat merumuskan pendapat awal, diskusikanlah pertanyaan dan isu yang mereka jumpai menjadi masalah atau membingungkan.

Tujuan diskusi ini ialah memberi suasana terjadinya proses dialogis antar pemilih tahap yang berbeda yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf moralita.

Dalam membimbing diskusi dibawah suasana yang dikendaki perlu adanya beberapa prosedur yang harus ditempuh yaitu sebagai berikut :

1. Membimbing proses dialogis antara dua pemilik tahap moralita yang berbeda, dengan cara :
 - a. Meneruskan proses dialogis
 - b. Menciptakan disequilibrium baru
 - c. Menyerahkan diskusi kepada siswa.

2. Secara bertahap melanjutkan diskusi sampai mencapai tahap moralita yang lebih tinggi.
3. Menyajikan argumentasi yang bertentangan satu tahap lebih tinggi dan argumentasi tahap tertinggi yang diajukan oleh anggota kelompok.

Tujuan tahap ini ialah untuk memberikan kemungkinan sebanyak-banyaknya dan siswa yang dapat meningkatkan penalaran moralnya setahap lebih tinggi. Dalam membimbing diskusi dibawah situasi yang tidak dikehendaki, guru dapat menempuh prosedur, mengarahkan dialog asal dialog-dialog selanjutnya dengan cara sebagai berikut :

1. Jika guru tidak dapat mengidentifikasi tahapan dari argumentasi ajukan pandangan yang berbeda dengan langkah sistematis.
2. Jika pemegang tahapan yang rendah tidak dapat memahami penalaran yang lebih tinggi tentukan kelompok yang bertahan dengan tahapnya itu dan pelan-pelan guru memberi rangsangan lain.
3. Jika taraf partisipasi siswa ternyata rendah segera telusuri sebab-sebabnya dan setelah diketahui adakah campur tangan oleh guru.
4. Jika tidak ada materi untuk tahap + I bekerjalah secara sistematis melihat butir-butir konflik dan lanjutkan dengan proses dialogis baru dan jika tetap tidak diperoleh, segera ubah ke dialog tahap yang lebih rendah.

Tujuan dari langkah ini sama dengan langkah sebelumnya yakni memungkinkan lebih banyak siswa yang dapat meningkatkan taraf moralitanya.

Selanjutnya tahap yang terakhir yaitu pada saat mengakhiri diskusi perlu ditempuh prosedur sebagai berikut :

1. Nyatakan bahwa saat diskusi sudah selesai.
2. Dalam situasi yang dikehendaki diskusi diakhiri pada saat telah sampai pada argumentasi + I
3. Dalam suasana yang tidak dikehendaki diskusi diakhiri setelah perbedaan-perbedaan pendapat dibicarakan.
4. Dalam situasi yang ragu-ragu atau membingungkan diskusi dapat diakhiri lebih dini.

Tujuan tahap akhir ini ialah mengakhiri diskusi, jika hal itu dipandang tidak produktif atau telah mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

C. Evaluasi Dalam Pembelajaran PKn

C.1 Konsep Evaluasi Dalam Pendidikan Kewarganegaraan

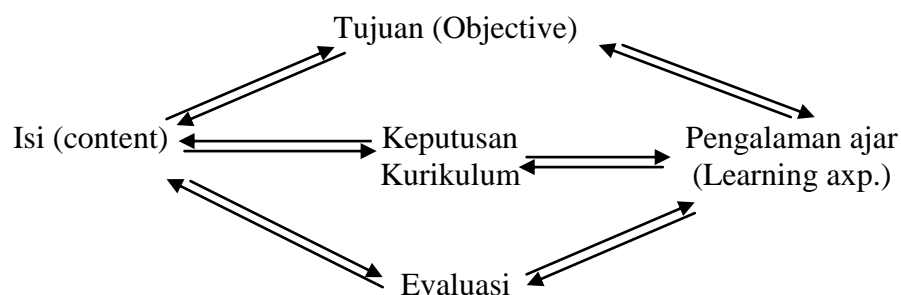
Dalam pengertian dan lingkup yang luas evaluasi pendidikan merupakan *“formal assessment of the worth of educational phenomena”* (Popham, 1975: 8). Didalamnya sekurang-kurangnya meliputi kegiatan-kegiatan pengukuran hasil belajar (*measurement*), pengangkaan (*grading and scoring*), pengkajian (*assessment*), dan akuntabilitas (*accountability*). Walaupun kegiatan-kegiatan itu satu sama lain berbeda dalam tahap, lingkup dan cara yang dilakukannya, kesemuanya diikat oleh satu kesamaan yakni *“Worth determination”* (1975: 9) yakni, penentuan derajat

kebaikan merupakan ciri pokok dari evaluasi. Secara operasional kegiatan evaluasi tersebut diwujudkan dalam bentuk :

- a. Evaluasi kurikulum (*reflektif, formatif, dan sumatif*).
- b. Evaluasi proses belajar (*intraaction analysis*).
- c. Evaluasi hasil belajar atau “achievement evaluation (*diagnosis, formatif, sumatif*).
- d. Akontabilitas pendidikan (*Cost-Benefit analysis, rate of return, cost-effectiveness*).

Evaluasi kurikulum biasanya dilakukan oleh tim pengembang (curriculum developer) yang merangkap menjadi tim penilai (*curriculum evaluator*) untuk evaluasi reflektif dan formatif. Sedangkan untuk evaluasi sumatif dilakukan oleh suatu tim tersendiri di luar tim pengembang. Evaluasi reflektif dan formatif berfungsi “prospektif” bagi kurikulum, sedangkan evaluasi sumatif berfungsi “retrospektif”. Dilain pihak, evaluasi proses dan hasil belajar hampir sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaksana kurikulum (*curriculum implementer*) termasuk didalamnya guru yang memang memiliki tugas dan fungsi lebih banyak untuk itu.

Dalam konsep dan proses kurikulum dalam pengertian “*Curriculum as an intention and a reality*” (Cohen, et al, 1978) evaluasi merupakan salah satu elemen atau komponen kurikulum yang terhadap yang lain berkedudukan interektif. Keseluruhan elemen kurikulum tersebut dapat digambarkan secara diagramatik, sebagai berikut :



(After Taba & Cohen)

Di sekolah menengah keputusan kurikulum sebagian besar diambil oleh para guru yang secara keseluruhan mereka berperan dalam proses kurikulum sebagai “*curriculum implementers*, dan *curriculum evaluator*”. Dalam model kurikulum di atas, semua komponen kurikulum berkedudukan setara. Tidak ada satu pun yang menjadi “*Master*” atau “*Servant*”. Dengan kata lain evaluasi berkedudukan sama pentingnya dengan komponen lainnya. Ia tidak lebih istimewa dari yang lain dan oleh sebab itu ia pun tidak dapat menentukan segalanya dalam proses kurikulum. Keputusan kurikulum dapat bertolak dari dan berorientasi pada komponen mana saja.

Namun demikian, lain halnya dengan model kurikulum “*sequential*” (Tyler: 1954, Taba: 1962) dan model pendekatan system (Banathy: 1968) dimana tujuan sebagai salah satu komponen kurikulum berkedudukan dan berfungsi “*decisive*” terhadap yang lain. Tujuan merupakan titik tolak isi dan perilaku komponen dan dengan sendirinya menjadi tolak ukur. Dalam model ini tujuan dapat dianggap sebagai “*master*”, *Content dan learning experiences*” sebagai “*followers*” dan evaluasi sebagai “*servant*” yang

lebih sering laku lalu berubah menjadi “*master*”. Model tersebut secara sederhana dapat dilukiskan sebagai berikut :



Memperhatikan kedua model konsep dan proses kurikulum tersebut para guru dapat memilih apakah evaluasi akan ditempatkan berdiri setara lebih, rendah atau lebih tinggi diantara komponen kurikulum yang lainnya. Pilihan tersebut merupakan putusan kurikulum yang sebaiknya diambil. Pada tingkat individu dan kelas proses belajar dan hasil belajar merupakan sasaran proses evaluasi. Walaupun proses dan hasil belajar dapat dibedakan satu sama lain tetapi dalam pelaksanaan evaluasi kedua hal tersebut sukar dipisahkan. Namun dalam praktek sehari-hari evaluasi lebih sering ditunjukkan pada isi (*content*) atau pada apa yang ada atau diperoleh siswa dari pada proses (*process*) atau apa yang terjadi pada diri siswa.

Telah dikemukakan bahwa evaluasi antara lain bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai atau tidak. Akan tetapi tercapainya tujuan pendidikan ini bukan hanya diukur oleh perumusan formal tujuan pendidikan tetapi juga diukur dengan berfungsi

tidaknya pengetahuan bagi dan dalam masyarakat. Oleh karena itulah dalam pembaharuan pendidikan dilontarkan ide-ide “*Out-Put Oriented, Child-centered, Life-Long Education Learning how to learn*” dan ide-ide lainnya. Jika kita teliti lebih jauh ide-ide itu merupakan kriteria keberhasilan yang dipolakan dalam dunia pendidikan. Secara serba sederhana kita dapat menyimpulkan bahwa ide di atas ditujukan agar pendidikan itu berguna baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Ide-ide di atas kemudian dituangkan dalam perumusan arti dan tujuan pendidikan nasional.

C.2 Model Alat Evaluasi Dalam Pembelajaran PKn

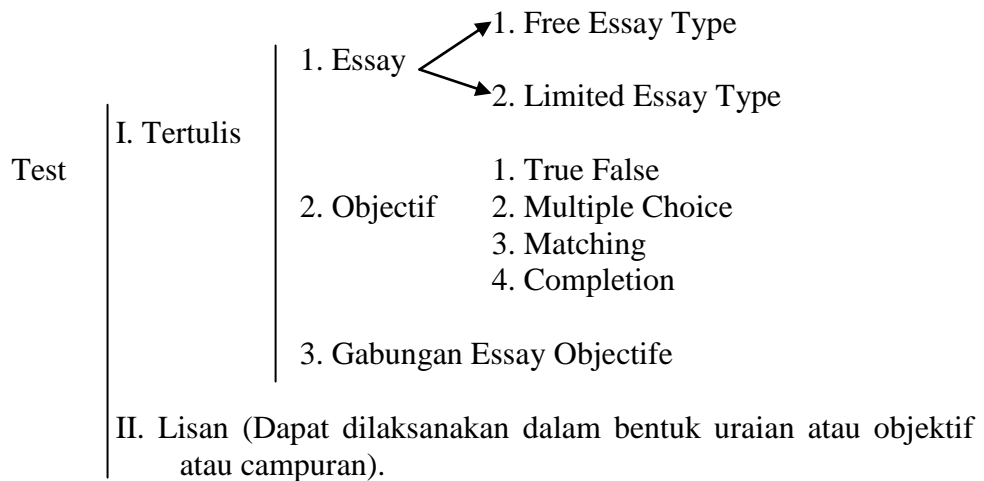
Dalam evaluasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan alat evaluasi yang dapat digunakan antara lain test, skala sikap moral, skala perbuatan, *Socio matriks*, catatan anekdote, dan sebagainya. Akan tetapi yang paling banyak dipergunakan sebagai alat evaluasi yaitu dengan test, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa test paling banyak dan bisa digunakan dalam hasil belajar. Didalam test itu sendiri dibagi kedalam dua jenis tes yaitu :

- 1). Standardized Test
- 2). Teacher Made Test.

Yang pertama merupakan test yang telah dibakukan dan telah merupakan standard bagi evaluasi untuk masing-masing bidang pada tingkat nasional. Bentuk ini masih dalam taraf pembuatan-pembuatan trayout, revisi dan seterusnya digarap oleh pusat pengujian Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia. Bentuk itulah yang paling lazim dan biasa digunakan oleh guru-guru baik dalam ulangan harian, maupun dalam ujian semester atau ujian akhir. Tiap bentuk memiliki persyaratan dengan kabaikan dan kelemahannya.

Gambar : Chart



2.1.4 Pengertian Demokrasi

Demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat , dimana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih melalui pemilihan umum. Pemerintah di negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara , beragama , berpendapat , berserikat setiap warga negara, menegakkan *rule of law* , adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak minoritas, dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak .

Demokrasi berasal dari kata Yunani, *demos* dan *kratos*. *Demos* mempunyai arti rakyat, dan *kratos* berarti pemerintahan. Secara keseluruhan demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Di dalam *The Advanced Learner's Dictionary of Current English* oleh Hornby. M. (PKn untuk mahasiswa, 2006:

56) bahwa yang dimaksud dengan *democracy* adalah :

1. *country with principles of government in which all adult citizens share through their elected representatives.*
2. *country with government which encourages and allows rights of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities.*
3. *society in which there is treatment of each other by citizens as equals.*

Dari kutipan pengertian tersebut di atas tampak bahwa demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara dimana setiap warga negara dewasa dapat turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih, melalui pemilihan umum dan adanya jaminan suatu kemerdekaan untuk berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan *rule of law*, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas, dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi peluang yang sama.

Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, mengintegrasikan demokrasi sebagai sistem yang memiliki sebelas pilar, yakni :

1. Kedaulatan rakyat
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
3. Kekuasaan mayoritas
4. Hak-hak minoritas
5. Jaminan Hak Asasi Manusia
6. Pemilihan yang bebas dan jujur
7. Persamaan di depan hukum

8. Proses hukum yang wajar
9. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional
10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik
11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat.

Menurut Amin Rais dalam C.B. Macpherson, (1986: 35) merumuskan menjadi 10 kriteria idealnya demokrasi, yakni (1) partisipasi dalam pembuatan keputusan, (2) persamaan di depan hukum, (3) distribusi pendapatan secara adil, (4) kesempatan pendidikan yang sama, (5) demokrasi memiliki empat macam kebebasan, (6) ketersediaan dan keterbukaan informasi, (7) mengindahkan fatsoen, (8) kebebasan individu, (9) semangat kerjasama, (10) hak untuk protes.

Untuk menumbuhkan keyakinan akan baiknya sistem demokrasi, serta terwujudnya kriteria ideal dari demokrasi, maka harus ada pola perilaku yang menjadi tuntunan atau norma/ nilai-nilai demokrasi yang diyakini masyarakat. Nilai-nilai dari demokrasi membutuhkan suatu demokrasi yang dilakukan dengan lima nilai yaitu menghargai keberagaman, dilakukan dengan jujur dan menggunakan akal sehat, dilaksanakan dengan kerja sama antarwarga negara, didasari sikap dewasa dan mempertimbangkan moral, maka setiap keputusan dan tingkah laku akan efisien dan efektif serta pencapaian tujuan masyarakat adil dan makmur akan lebih mudah tercapai.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi diartikan sebagai: “gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara”.

Hasbullah (2006: 49-51) mengemukakan demokrasi dalam pengertian lebih luas, patut dianalisa sehingga memberikan manfaat dalam praktik kehidupan dan pendidikan yang paling tidak mengandung hal-hal sebagai berikut :

a. Rasa Hormat terhadap Harkat Sesama Manusia

Dalam hal ini demokrasi dianggap sebagai pilar pertama untuk menjamin persaudaraan hak manusia dengan tidak memandang jenis kelamin, umur, warna kulit, agama dan bangsa. Dalam pendidikan, nilai-nilai inilah yang ditanamkan dengan memandang perbedaan antara individu yang satu dengan yang lainnya, baik hubungan antara sesama peserta didik atau hubungan antara peserta didik dengan gurunya yang saling menghargai dan menghormati.

b. Setiap Manusia Memiliki Perubahan ke Arah Pikiran yang Sehat

Acuan inilah yang melahirkan adanya pandangan bahwa manusia itu haruslah dididik. Dengan pendidikanlah manusia akan berubah dan berkembang kearah yang lebih sehat dan baik serta sempurna. Oleh karena itu, sebagai lembaga pendidikan sekolah diharapkan dapat mengembangkan anak didik untuk berfikir dan memecahkan persoalan-persoalan sendiri secara teratur, sistematis dan komperhensif serta kritis sehingga anak memiliki wawasan, kemampuan, dan kesempatan yang luas. Tentunya dalam proses seperti ini diperlukan sikap yang demokratis dan tidak terjadi pemaksaan pandangan terhadap orang lain.

c. Rela Berbakti untuk Kepentingan dan Kesejahteraan Bersama

Dalam konteks ini, pengertian demokrasi tidaklah dibatasi oleh kepentingan individu-individu lain. Dengan kata lain, seseorang menjadi bebas karena orang lain menghormati kepentingannya. Norma-norma atau aturan serta tata nilai yang terdapat di masyarakat itulah yang membatasi dan mengendalikan kebebasan setiap orang. Untuk itu, warga negara yang demokratis akan dapat menerima pembatasan kebebasan itu dengan rela hati. Artinya tiap-tiap warga negara hendaklah memahami kewajibannya sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara dari suatu negara demokratis yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya.

Berkenaan dengan itulah maka bagi setiap warga negara diperlukan hal-hal berikut ini :

- a. Pengetahuan yang cukup tentang masalah-masalah kewarganegaraan, kemasyarakatan, dan soal-soal pemerintahan yang penting.
- b. Suatu keinsyafan dan kesanggupan semangat menjalankan tugasnya, dengan mendahulukan kepentingan negara atau masyarakat daripada kepentingan sendiri atau kepentingan sekelompok kecil manusia.
- c. Suatu keinsyafan dan kesanggupan memberantas kecurangan-kecurangan dan perbuatan-perbuatan yang menghalangi kemajuan dan kemakmuran masyarakat dan pemerintah.

Yang paling utama dalam berlakunya demokrasi di suatu negara ialah ada atau tidaknya asas-asas demokrasi, yaitu :

1. Pengakuan hak-hak asasi manusia sebagai penghargaan terhadap martabat manusia dengan tidak melupakan kepentingan umum.
2. Adanya partisipasi dan dukungan rakyat kepada pemerintah, jika dukungan rakyat tidak ada, sulitlah bahwa pemerintah itu adalah suatu pemerintahan demokrasi.

Menurut Pidie (1986) menuraikan makna demokrasi yang didekati dari arti formal adalah sebagai suatu sistem politik atau sistem pemerintahan dimana kedaulatan rakyat itu tidak dilaksanakan sendiri oleh rakyat, melainkan melalui wakil-wakil yang dipilihnya dilembaga perwakilan. Sedangkan dalam arti materiel disebut demokrasi sebagai asas, yang dipengaruhi oleh kultur, historis suatu bangsa sehingga dikenal demokrasi konstutusional, demokrasi rakyat, dan demokrasi pancasila.

Alamudi (1991) menjelaskan bahwa demokrasi, sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk dari sejarah panjang dan berliku-liku serta demokrasi merupakan pelembagaan dari kebebasan.

Menurut M. Durverger (1954), demokrasi adalah termasuk cara pemerintahan, dimana golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah itu sama dan tidak terpisah-pisah.

Dari berbagai pengertian demokrasi sebagaimana dikemukakan di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa demokrasi menekankan adanya prinsip-prinsip persamaan dan kebebasan yang dilandasi oleh norma-norma atau

aturan yang berlaku. Dan disamping itu bahwa demokrasi merupakan konsep yang memiliki makna dan ciri-ciri dasar yang bersifat universal atau berlaku secara umum. Namun dalam penerapannya setiap negara memiliki kekhasan masing-masing. Penerapan demokrasi dalam suatu negara, bergantung kepada 1). idiologi dan falsafahyang dianutnya, 2). sistem nilai budaya yang dianutnya, 3). karakteristik masyarakatnya dan 4). sejarah kehidupan bangsa dan negaranya. Oleh karena hal tersebutlah sehingga yang menjadi dasar penerapan demokrasi di berbagai negara itu memiliki ciri khas masing-masing seesuai dengan karakter bangsa dan negaranya tersebut.

2.1.4.1. Nilai-Nilai Demokrasi

Menurut Gordon Allport dalam Rohmat Mulyana (2004: 9) ”nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar keyakinannya”. Nilai terjadi pada wilayah psikologis yang disebut keyakinan. Seperti ahli psikologi pada umumnya, keyakinan ditempatkan sebagai wilayah psikologis yang lebih tinggi dari wilayah lainnya seperti hasrat, motif, sikap, keinginan, dan kebutuhan.

Kuppermen dalam Rohmat Mulyana (2004: 9) ” nilai adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya diantara cara-cara tindakan alternatif”. Definisi ini memiliki tekanan utama pada norma sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi prilaku manusia.

Nilai-nilai demokrasi sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan nilai atau

kondisi inilah, sebuah pemerintahan demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya, tanpa adanya kondisi ini, pemerintahan tersebut akan sulit ditegakkan. Nilai-nilai tersebut antara lain, adalah kebebasan, (berpendapat, berkelompok, berpartisipasi), menghormati orang/ kelompok lain, kesetaraan, kerjasama, persaingan dan kepercayaan. Disamping nilai-nilai tersebut di atas diperlukan pula sebuah kondisi agar nilai-nilai tersebut dapat ditegakkan sebagai pondasi demokrasi.

Menurut Fraenkel (1981: 13) “nilai adanya dalam diri atau jiwa manusia, serta berlainan satu dengan lainnya”. Sedangkan menurut Rokeah (2003: 22) “nilai adalah sesuatu yang berharga, yang dianggap bernilai, adil, baik dan indah serta menjadi pedoman atau pegangan diri”.

Gaffar (1999) mengatakan *”democracy relates to the fundamental human rights, which includes freedom of expression, freedom of belief and freedom of action. To avoid chaos, in practice, democracy recognizes such values as responsibility, self discipline, objective, rational, love and care, respect for others, and acceptance of differences of opinions.*

Berdasarkan pandangan tersebut di atas, demokrasi berkaitan erat dengan hak dasar sebagai manusia, seperti kebebasan berekspresi, kebebasan dalam keyakinan, dan kebebasan dalam perilaku. Nilai-nilai demokrasi harus dilaksanakan atau dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari seperti tanggung jawab, disiplin diri, berpikir objektif dan rasional, kasih sayang dan peduli, respek terhadap sesama, dan menerima perbedaan pendapat diantara sesama warga masyarakat.

Seseorang akan dapat menyesuaikan dirinya pada cara hidup demokratis jika ia mampu mendisiplinkan dirinya kearah persatuan dan kesatuan yang diperoleh melalui penggunaan perilaku kreatif dan dinamik serta memahami segi-segi positif kamajemukan masyarakat. Masyarakat yang teguh berpegang pada pandangan hidup demokratis harus dengan sendirinya teguh memelihara dan melindungi lingkup keragaman yang luas. Pandangan hidup yang seperti ini menuntut moral pribadi yang tinggi. Kesadaran akan pluralitas sangat penting dimiliki bagi rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sangat beragam dari sisi etnis, bahasa, budaya, agama dan potensi alamnya. Berikut ini akan disajikan dimensi-dimensi nilai demokrasi dan indikatornya yang harus dibelajarkan kepada siswa.

Tabel 2: Dimensi-dimensi Nilai Demokrasi Dan Indikatornya Yang Harus Ditanamkan Kepada Siswa.

No	Dimensi Nilai Demokrasi	Indikator Nilai
1	Penghormatan pada hukum dan ketertiban	a. Disiplin b. Penghormatan pada yang berwenang c. Saling mempercayai
2	Kebebasan dan tanggung jawab	a. Cara hidup yang demokratis dan bertanggungjawab b. Kebebasan berekspresi dan pengutaraan yang jelas c. Penghormatan pada hak orang lain
3	Persamaan	a. Kepercayaan pada martabat manusia b. Pengakuan atas hak-hak orang lain
4	Disiplin	a. Kesopansantunan b. Tingkahlaku yang baik dalam pergaulan manusia c. Penyelesaian pertikaian tanpa kekerasan
5	Kewarganegaraan yang aktif dan bertanggungjawab	a. Kesiapan untuk berbuat sukarela b. Kesadaran kewarganegaraan c. Keyakinan akan berpartisipasi
6	Keterbukaan	a. Percakapan dan konsultasi b. Berunding dan negosiasi c. Pikiran yang terbuka berdasarkan kebenaran

		ilmiah dan nilai-nilai universal
7	Berpikir kritis	a. Pemikiran rasional b. Pandangan ilmiah c. Jiwa yang bertanya d. Mencari kebenaran e. Keputusan berdasarkan pengetahuan atau informasi yang benar
8	Solidaritas	a. Pengambilan keputusan kolektif b. Kerjasama c. Bekerja dalam regu d. Pemecahan masalah dalam damai

Sumber: Buku Sumber UNESCO-APNIEVE (*Asia-Pasifik Network of Internasional education and values education = jaringan asia pasifik untuk pendidikan internasional dan pendidikan nilai*)

Kehidupan demokrasi tidak akan datang, tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demokrasi memerlukan usaha nyata setiap warga negara dan perangkat penduduknya dan dijadikannya demokrasi sebagai pandangan hidup dalam kehidupan bernegara. Nilai-nilai dari demokrasi membutuhkan hal-hal berikut:

1. Kesadaran pluralisme .
2. Sikap yang jujur dan pikiran yang sehat
3. Demokrasi membutuhkan kerja sama antar warga masyarakat dan sikap adanya kesadaran untuk dengan tulus menerima kemungkinann kompromi atau kekalahan dalam pengambilan keputusan .
4. Demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan
5. Demokrasi membutuhkan pertimbangan moral .

Nilai-nilai demokrasi secara formal konstitusional terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, yakni “...mengantar rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan

makmur” (alinea 2); “...maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya” (alinea 3); “...maka disusunlah kemerdekaan, kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan...” (alinea 4).

Atas dasar asas tersebut di atas, maka Henry B. Mayo (1990: 46) merincikan nilai-nilai dalam demokrasi, sebagai berikut:

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dan dalam suatu masyarakat yang sedang berubah
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum
5. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman
6. Menjamin tegaknya keadilan.

Jelaslah bahwa dalam upaya merealisasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi, pendidikan kewarganegaraan menjadi sedemikian penting untuk ditanamkan kepada setiap siswa. Dengan demikian, tampaknya demokrasi merupakan pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari.

2.1.4.2 Materi Demokrasi Dalam Kurikulum Sekolah

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pelajaran yang tersusun secara hierarkis dan memuat konsep-konsep yang saling berkaitan, antara konsep yang satu dengan konsep yang lain, yang membekali siswa dengan budi pekerti, pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan warga negara dengan negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara yang bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia agar menjadi warga negara yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri dan dapat diandalkan bangsa dan negara.

Munurut Modul Kapita Selekta PKn (2006: 16), disebutkan bahwa di dalam mata pelajaran PKn terdapat beberapa dimensi dari Pendidikan Kewarganegaraan, beberapa dimensi tersebut ialah:

Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan :

1. Dimensi Hukum, dalam dimensi ini memuat segala aspek dan perkembangan hukum yang ada di Indonesia yang menekankan pada asas “Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan yang berdasarkan hukum, dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka”.
2. Dimensi Politik, pada dimensi ini dibahas semua masalah politik atau isu-isu yang berkembang di dalam dan luar negara, dimensi politik ini akan memberikan pengetahuan yang luas mengenai politik perkembangan negara, sejauh mana politik di Indonesia ini sudah berkembang dengan baik.
3. Dimensi Watak Warga Negara, dalam dimensi ini membahas dan menelaah mengenai keterampilan warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar dapat menjadi pribadi yang tangguh, bertanggungjawab, mempunyai paham kebangsaan, dan dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.
4. Dimensi Kenegaraan, dimensi kenegaraan membahas segala aspek yang berhubungan dengan susunan pemerintahan, ketatanegaraan, dan segala aspek yang berhubungan dengan tata pemerintahan atau tata

Negara Indonesia, baik dari pemerintahan pusat sampai pada pemerintahan yang ada di daerah.

5. Dimensi Moral, dimensi ini lebih dalam menyentuh dan menyelami moral atau tingkah laku warga negara sebagai insan dan individu yang hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang harus dapat saling menghormati dan menghargai individu lainnya sebagai teman hidup bersama di dunia ini.

Materi Demokrasi adalah pokok bahasan yang terdapat pada kurikulum sekolah menengah pertama dan termasuk dalam dimensi pendidikan kewarganegaraan. Dalam Pendidikan Kewarganegaraan materi demokrasi merupakan materi prasyarat untuk materi selanjutnya, misalnya materi demokrasi yang dipelajari pada tingkat SMP akan ditampilkan kembali pada tingkat SMA dalam materi sistem politik Indonesia yang di dalamnya mencakup pelaksanaan sistem politik yang berlaku di Indonesia. Materi demokrasi adalah materi atau pokok bahasan yang bersumber pada sila keempat dari Pancasila, yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Materi yang sangat dekat dengan nilai-nilai demokrasi adalah pada materi kelas VII (tujuh) dan kelas VIII (delapan). Untuk lebih jelasnya standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3: Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Kelas VII, Semester 1

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1. Menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	1.1 Mendeskripsikan hakikat norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, peraturan, yang berlaku dalam masyarakat 1.2 Menjelaskan hakikat dan arti penting hukum bagi warganegara

	1.3 Menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Mendeskripsikan makna Proklamasi Kemerdekaan dan konstitusi pertama	2.1 Menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan 2.2 Mendeskripsikan suasana kebatinan konstitusi pertama 2.3 Menganalisis hubungan antara proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945 2.4 Menunjukkan sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan dan suasana kebatinan konstitusi pertama

Kelas VII, Semester 2

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
3. Menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan penegakan Hak Azasi Manusia (HAM)	3.1 Menguraikan hakikat, hukum dan kelembagaan HAM 3.2 Mendeskripsikan kasus pelanggaran dan upaya penegakan HAM 3.3 Menghargai upaya perlindungan HAM 3.4 Menghargai upaya penegakan HAM
4. Menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat	4.1 Menjelaskan hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat 4.2 Menguraikan pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab 4.3 Mengaktualisasikan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab

Kelas VIII, Semester 1

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1. Menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila	1.1 Menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara 1.2 Menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara 1.3 Menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan

	<p>bernegara</p> <p>1.4 Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat</p>
2. Memahami berbagai konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia	<p>2.1 Menjelaskan berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia</p> <p>2.2 Menganalisis penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang berlaku di Indonesia</p> <p>2.3 Menunjukkan hasil-hasil amandemen UUD 1945</p> <p>2.4 Menampilkan sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen</p>
3. Menampilkan ketaatan terhadap perundang-undangan nasional	<p>3.1 Mengidentifikasi tata urutan peraturan perundang-undangan nasional</p> <p>3.2 Mendeskripsikan proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional</p> <p>3.3 Mentaati peraturan perundang-undangan nasional</p> <p>3.4 Mengidentifikasi kasus korupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia</p> <p>3.5 Mendeskripsikan pengertian anti korupsi dan instrumen (hukum dan kelembagaan) anti korupsi di Indonesia</p>

Kelas VIII, Semester 2

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
4. Memahami pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan	<p>4.1 Menjelaskan hakikat demokrasi</p> <p>4.2 Menjelaskan pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara</p> <p>4.3 Menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan</p>
5. Memahami kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan di Indonesia	<p>5.1 Menjelaskan makna kedaulatan rakyat</p> <p>5.2 Mendeskripsikan sistem pemerintahan Indonesia dan peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat</p> <p>5.3 Menunjukkan sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia</p>

Dari penjabaran tabel 2 di atas tersebut, maka sikap demokrasi memang sudah seharusnya telah tertanam atau ditanamkan sejak dini dalam benak warga negara dan dapat diamalkan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sekolah formal dicirikan dengan adanya kurikulum yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kependidikan (SD, SMP, SMA). Konsep atau materi yang akan disampaikan oleh guru kepada siswa harus disesuaikan dengan tingkat kependidikan siswa menurut kurikulum yang berlaku, dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan penguasaan konsep karena tidak sesuai dengan tingkat kematangan siswa.

Hal ini diungkapkan juga oleh Wibowo dkk (1997: 11) yang menyatakan bahwa: “Apabila murid tidak memahami suatu konsep salah satu kemungkinannya adalah murid tersebut belum sampai pada tingkat kematangan (*mature*) tertentu yang sesuai dengan tingkat kesukaran konsep”.

Telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dalam standar isi pendidikan kewarganegaraan SMP/MTS bahwa standar kompetensi pada materi demokrasi adalah “Memahami pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan”, sedangkan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa adalah “menjelaskan hakikat demokrasi, menjelaskan pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan”.

2.2 Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan

Hasil penelitian Udin Sarifudin Winataputra (2001: 26) mengemukakan bahwa pendidikan demokrasi yang kini dengan tegas diterima sebagai esensi pendidikan kewarganegaraan secara kurikuler merupakan bagian integral dari pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yang dibingkai dengan satu dengan nilai-nilai masing-masing sila sebagai intinya dalam kedudukan yang setara dan interaktif. Dengan paradigma yang ada itu maka secara substantif di dalam pendidikan kewarganegaraan terkandung makna pendidikan pancasila, dalam arti berlandaskan dan berorientasi pada cita-cita dan nilai yang secara koheren dan sistemik terkandung dalam pancasila.

Dewasa ini tumbuh gagasan yang kuat untuk menempatkan pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana utama dan esensi dari pendidikan demokrasi, pendidikan demokrasi dan dalam rangka penanaman nilai-nilai dari demokrasi dapat di implementasikan dalam bentuk kegiatan pembelajaran yang dapat menggunakan berbagai metode pengajaran seperti: sosiodrama, bermain peran, simulasi, maupun diskusi.

Selanjutnya hasil penelitian Adelina Hasyim, (2009: 5) Sukses dalam melaksanakan pembelajaran dipengaruhi bagaimana seorang guru mampu mengelola proses pembelajaran dengan baik. Jika guru memilih model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, berarti guru tersebut telah membantu siswa terlibat dalam proses pembelajaran, dan mampu menjadi siswa yang dapat mencari, mengolah dan memiliki kompetensi yang menjadi tujuan belajarnya. Model pembelajaran melukiskan

prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan. Fungsi model pembelajaran adalah pedoman bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Oleh karena itu proses pembelajaran yang bersumber dari suatu model pembelajaran merupakan kegiatan bertujuan yang tertata secara sistematis. Dengan penerapan suatu model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan disajikan dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik siswa maka tujuan pembelajaran dan harapan dari guru akan tercapai dengan maksimal.